



PAD Kapuas Hulu Meningkat 25,17%

KAPUAS HULU, TRIBUN

- Wakil Bupati, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat, Sukardi, menyampaikan bahwa, ada perubahan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 25,17%, dalam perubahan APBD 2025.

"Peningkatan tersebut, bersumber dari penyesuaian terhadap beberapa komponen, di antaranya penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), opsen pajak kendaraan bermotor, serta pengembalian belanja hibah dari KPU dan Bawaslu," ujarnya, Sabtu 26 Juli 2025.

Sukardi menjelaskan, kenaikan PAD ini turut didukung dengan adanya peralihan kewenangan pemu-

ngutan pajak dari provinsi ke kabupaten.

"Pemerintah juga telah mengambil langkah-langkah strategis untuk meningkatkan PAD, seperti pendataan penggunaan listrik mandiri, pemanfaatan air tanah, pemutakhiran NJOP PBB-P2, dan pemasangan alat perekam pajak restoran," ucapnya.

Wabup juga menyatakan, penurunan pendapatan transfer dari pemerintah pusat, merupakan dampak dari kebijakan efisiensi nasional sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025.

"Untuk menyikapi hal ini, kami telah melakukan penyesuaian anggaran secara efisien di tiap perangkat da-

erah, serta realokasi belanja berdasarkan hasil audit BPK. Selain itu, penyesuaian juga melibatkan pengelolaan kembali SILPA yang berasal dari berbagai sumber, seperti kas daerah, BLUD, program JKN, dan lainnya," ujarnya.

Dalam hal ini juga, pemerintah telah merealisasikan penyertaan modal sebesar Rp 10 miliar ke Bank Kalbar, dan menerima dividen sebesar Rp 17,46 miliar pada tahun anggaran berjalan.

"Tambahan PAD sebesar Rp 22,3 miliar juga dijelaskan berasal dari berbagai sumber sah, termasuk retribusi parkir, dividen BUMD, dan pengembalian hibah," ucapnya.

Wakil Bupati juga menegaskan, bahwa program-program prioritas tetap menjadi perhatian utama pemerintah daerah. Salah satunya adalah program jaminan kesehatan nasional untuk peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI), yang mengalami peningkatan anggaran dari Rp 7,34 miliar menjadi Rp 7,64 miliar.

"Selain itu, kami terus berkomitmen untuk memperkuat layanan dasar di bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, termasuk percepatan pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang pembentukan Koperasi Merah Putih dan penanganan permasalahan persampahan," ungkapnya. (rul)